



KATA PENGANTAR

Ketersebaran pulau-pulau kecil yang terbentang dari Sabang sampai Merauke menimbulkan kendala serius dalam melaksanakan percepatan pembangunan di pulau-pulau kecil akibat kurangnya tersedianya prasarana dan sarana yang memadai di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan.

Pengelolaan pulau-pulau kecil selama ini dirasakan belum optimal dan mengalami kendala karena ukurannya yang relatif kecil dan lokasinya yang terisolir. Hal ini mengakibatkan mahalnya prasarana dan sarana seperti perhubungan dan transportasi serta sulitnya akses komunikasi. Di samping itu, pulau-pulau kecil sering menjadi tempat yang rawan terhadap penyelundupan, pembuangan limbah, penambangan pasir, dan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, baik oleh nelayan asing maupun lokal. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil sangat diperlukan terutama untuk mengantisipasi menurunnya kualitas lingkungan yang dapat mengakibatkan tenggelamnya pulau-pulau kecil dan rusaknya terumbu karang. Kerusakan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor manusia tetapi juga oleh kejadian-kejadian alam seperti perubahan iklim akibat pemanasan global, gempa, tsunami, abrasi pantai, dan lain-lain.

Pada sisi lain, potensi pulau-pulau kecil sangat tinggi dilihat dari segi sosial, ekonomi dan budaya serta strategis dari sisi politik, pertahanan dan keamanan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terutama pulau-pulau kecil yang berada di wilayah perbatasan karena berkaitan dengan batas wilayah antar negara.

Pengelolaan pulau-pulau kecil perlu didukung oleh Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) yang integratif dan disepakati secara nasional untuk menjadi

landasan dan acuan bagi *stakeholders* baik di pusat maupun di daerah. Untuk itu, dalam era otonomi daerah, penyusunan Jakstranas pengelolaan pulau-pulau kecil yang disepakati secara lintas sektor dan daerah dirasakan sangat mendesak.

Naskah Jasktranas ini merupakan hasil kerjasama antara Departemen Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan Tim Pokja Strategi Pengembangan dan Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil (SP4K) yang beranggotakan Departemen/Lembaga Non Departemen terkait dengan pengelolaan pulau-pulau kecil, yaitu ; Bappenas, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Perhubungan, Departemen Kimpraswil, Departemen ESDM, Departemen Nakertrans, Departemen Kehutanan, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Menneq Lingkungan Hidup, Menneq PPKTI, Menneq Kebudayaan dan Pariwisata, BPPT, DISHIDROS, Bakosurtanal, BPN, LIPI, LAPAN dan TNI - AL.

Dalam proses penyempurnaan naskah Jakstranas ini, telah dilakukan konsultasi publik baik di tingkat pusat (interdep) maupun di daerah yang meliputi wilayah Indonesia bagian Barat (Batam), bagian Tengah (Makassar) dan bagian Timur (Sorong) dengan melibatkan instansi terkait di daerah, masyarakat/LSM dan Perguruan Tinggi serta Swasta/Dunia Usaha.

Dengan adanya Jakstranas ini diharapkan upaya pengembangan dan pemanfaatan pulau-pulau kecil dapat dilakukan secara optimal, sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara adil dan berkelanjutan (*on a sustainable basis*) menuju Indonesia yang maju, makmur, berkeadilan, dan diridloi Tuhan YME.

Jakarta, Desember 2003

Menteri Kelautan dan Perikanan

Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup	1
1.3. Tujuan dan Sasaran	2
2. GAMBARAN STRATEGIS PULAU-PULAU KECIL	
2.1. Pengertian Umum Pulau-pulau Kecil	3
2.2. Potensi Pulau-pulau Kecil	3
2.2.1. Potensi Sumberdaya Hayati Pulau-pulau Kecil	3
2.2.2. Sumberdaya Perikanan	5
2.2.3. Potensi Sumberdaya Nir Hayati	5
2.2.4. Jasa-jasa Lingkungan	6
2.3. Arti Penting Pulau-pulau Kecil	7
2.3.1. Fungsi Pertahanan Keamanan	7
2.3.2. Fungsi Ekonomi	7
2.3.3. Fungsi Ekologi	7
2.4. Isu-isu Pengelolaan Pulau-pulau Kecil	8
2.4.1. Isu Global	8
2.4.2. Isu Regional	8
2.4.3. Isu Nasional	9
2.4.4. Isu Daerah	10
2.5. Permasalahan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil	10
3. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL	13
3.1. Visi dan Misi	13
3.2. Sasaran	13

3.3. Kebijakan	14
3.4. Strategi	15
3.4.1. Strategi Umum	15
3.4.2. Strategi Khusus.....	18
4. PELAKSANAAN DAN KELEMBAGAAN.....	24
4.1. Program Prioritas.....	24
4.2. Penyusunan Rencana Tindak (<i>Action Plan</i>)	24
4.3. Penyusunan Rencana Bisnis (<i>Business Plan</i>).....	25
4.4. Pembiayaan	25
4.5. Kelembagaan.....	25
4.5.1. Pemerintah Pusat	25
4.5.2. Pemerintah Propinsi	26
4.5.3. Pemerintah Kabupaten/Kota.....	26
4.5.4. Peran Masyarakat dan Swasta/ Dunia Usaha	27
4.6. Pembinaan dan Pengawasan.....	27
5. PENUTUP.....	28
<i>GLOSSARY</i>	29
MATRIKS KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL.....	32
UCAPAN TERIMA KASIH	35